

Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Lalu Nasrulloh^{1*}, Zulkarnain²

Institut Agama Islam Negeri Sorong¹, STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB ²
laluarul90@iainsorong.ac.id¹, karnaenzul1990@gmail.com²

Korespondensi*

Diterima : 2023-02-23

Direvisi : 2023-04-08

Disetujui: 2023-10-24

Abstract: Democracy in Islamic Education is a highly important issue to investigate because it has the potential to provide significant benefits in the development of education, the understanding of democracy, and the understanding of Islamic values in the context of education. The purpose of this research is to identify the principles of democracy in Islamic Education and their implementation in teaching and learning. This research is based on a review of various literature sources that encompass the concepts of democracy in the context of Islamic education, the principles of democracy in Islamic Education, and their implementation in teaching and learning. The research findings reveal (1) the presence of two principles of democracy in Islamic Education: the freedom for educators and learners, where freedom includes the freedom to create, the freedom to develop potential, and the freedom to express opinions. (2) The form of implementing democracy in Islamic education is in the form of idealistic education, which is integral, humanistic, pragmatic, and rooted in strong cultural values. These findings are expected to be of concern to educators in shaping equality in education.

Keywords: *Democracy, Education, Islamic Education*

Abstrak: Demokrasi dalam Pendidikan Islam merupakan isu yang sangat penting untuk diteliti karena berpotensi memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan pendidikan, pemahaman demokrasi, dan pemahaman nilai-nilai Islam dalam konteks pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi dalam Pendidikan Islam dan implementasinya dalam proses belajar mengajar. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan terhadap berbagai sumber literatur yang mencakup konsep demokrasi dalam konteks pendidikan Islam, prinsip-prinsip demokrasi dalam Pendidikan Islam, dan implementasinya dalam proses belajar mengajar. Hasil penelitian mengungkapkan (1) adanya dua prinsip demokrasi dalam Pendidikan Islam, yaitu kebebasan pendidik dan peserta didik, dimana kebebasan tersebut meliputi kebebasan berkreasi, kebebasan

mengembangkan potensi, dan kebebasan mengemukakan pendapat. (2) Wujud penerapan demokrasi dalam pendidikan Islam berupa pendidikan idealis, integral, humanistik, pragmatis, dan berakar pada nilai-nilai budaya yang kuat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi perhatian para pendidik dalam membentuk kesetaraan dalam pendidikan.

Kata Kunci: Demokrasi, Pendidikan, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Permasalahan dalam dunia pendidikan masih sering terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, permasalahan yang dimaksud adalah guru sering menjadi sorotan dari banyak hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat.¹ Misalnya, saat anak-anak ketergantungan menonton televisi, maka sekolah yang menjadi sasaran karena dianggap tidak memberikan pendidikan media yang maksimal. Selanjutnya, di saat ada terjadi tawuran, sekolah akan disorot, karena dianggap kurang menanamkan pendidikan karakter.

Selain itu, masih banyak problem yang pada ujungnya sekolah yang dikambinghitamkan. Padahal bukan hanya sekolah yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama. Maka dari itu, pendidikan bisa dijamin dan memiliki masa depan yang baik, asalkan tanggung jawab itu tidak di berikan sepenuhnya kepada sekolah. Pada dasarnya, proses pendidikan ini harus memiliki mata rantai antara, sekolah, individu, keluarga, dan masyarakat, supaya menjadi tripusat pendidikan yang harus saling berpengaruh satu sama lainnya.² Konsep pendidikan yang demokratis merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya.³

Pengertian demokratis di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Jadi, demokrasi pendidikan adalah proses pendidikan yang menghargai potensi (pembawaan), persamaan dan kebebasan peserta didik dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan segala potensi dirinya

¹ A. D. Olofsson, G. Fransson, and J. O. Lindberg, "A Study of the Use of Digital Technology and Its Conditions with a View to Understanding What 'Adequate Digital Competence' May Mean in a National Policy Initiative," *Educational Studies* 46, no. 6 (2020): 727–43, <https://doi.org/10.1080/03055698.2019.1651694>.

² Sulo L. Tirtarahardja, U., *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

³ Ubaedillah & Rozak, *Pendidikan Kewarga Negara Civic Education Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

secara optimal. Tanpa memandang atau membedakan suku, agama maupun budaya.⁴ Secara umum bahwa demokrasi pendidikan bisa dimaknai sebagai suatu tatanan di mana nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan, musyawarah, persamaan, kebebasan, kemajemukan dan toleransi, dijadikan sebagai landasan atau asas dalam seluruh program dan praktik pendidikan.

Dalam situasi saat ini banyak masalah pendidikan yang muncul, seperti kurangnya keadilan dalam memperoleh akses pendidikan. Dapat dilihat betapa banyaknya perlakuan orangtua yang selalu meyalahkan guru dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Padahal, ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan bukan semata-mata kesalahan guru, melainkan banyak faktor eksternal sekolah yang menjadi penyebabnya. Sikap orang tua yang selalu menyalahkan guru dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks pendidikan, inilah yang disebut dengan nilai dan praktik demokrasi pendidikan yang belum dimiliki oleh seorang wali murid.⁵

Di sisi lain, masyarakat juga tidak bisa disalahkan begitu saja, mengingat ketidakadilan dalam pendidikan masih dapat dijumpai.⁶ Ketidakadilan pendidikan di Indonesia mencakup sejumlah masalah kompleks yang mempengaruhi akses, kualitas, dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Salah satu isu utama adalah disparitas antara wilayah urban dan rural, di mana penduduk pedesaan seringkali menghadapi kendala aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan. Faktor ekonomi juga menjadi hambatan serius, terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah yang kesulitan memenuhi biaya pendidikan.⁷

Disparitas kualitas pendidikan antar daerah, terutama antara perkotaan dan pedesaan, menciptakan ketidaksetaraan dalam pengalaman belajar siswa.⁸ Selain itu, ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah, dengan

⁴ Irawan Irawan and Denny Hermawan, "Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019): 626–31, <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i2.5254>.

⁵ Muhammad Roihan Daulay, "Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2017): 91, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.632>.

⁶ Fatmariza, "MEWUJUDKAN MASYARAKAT DEMOKRATIS MELALUI PEMELITIAN PENDIDIKAN YANG SERPERSPEKTIF GENDER," 2015.

⁷ Khairul Saleh, Muhsim, and Nurul Hidayati Murtafiah, "Implementasi Pendidikan Multikultural Di Indonesia Antara Harapan Dan Realita," *Journal of Islamic Education and Learning* 2, no. 2 (2022): 111–26, <https://ejournal.stisidulamtim.ac.id/index.php/JIEL/article/view/60>.

⁸ Madekhan Madekhan, "Tantangan Pembaruan Pendidikan Di Indonesia," *Kuttab* 5, no. 2 (2021): 130, <https://doi.org/10.30736/ktb.v5i2.702>.

perempuan seringkali menghadapi hambatan budaya dan sosial dalam mengakses pendidikan. Anak-anak dengan disabilitas juga sering kali dikesampingkan, sementara kurangnya guru berkualitas, terutama di daerah terpencil, menambah kompleksitas masalah ini. Pentingnya memperhatikan keragaman budaya dan konteks lokal dalam kurikulum juga menjadi bagian integral dalam mengatasi ketidakadilan ini. Untuk mengatasi ketidakadilan pendidikan, diperlukan upaya bersama melalui reformasi kebijakan, peningkatan alokasi dana yang adil, peningkatan kualitas guru, dan inklusi pendidikan yang memperhitungkan keberagaman masyarakat Indonesia.⁹

Untuk memperoleh informasi yang lebih jauh tentang kajian demokrasi pendidikan, tulisan ini akan membahas demokrasi pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Adapun sub yang akan dikembangkan dalam tulisan ini adalah demokrasi dalam Islam, demokrasi dalam Pendidikan Islam, implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Islam, dan dasar demokrasi pendidikan menurut Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kepustakaan (*library research*), di mana penulis membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.¹⁰ Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan beberapa tafsir yang berkaitan dengan pendidikan demokratis. Sedangkan sumber data sekundernya, yaitu buku-buku, jurnal dan lain-lain yang membahas mengenai permasalahan judul yang diteliti. Langkah yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah langkah deskriptif, yaitu langkah yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal tentang permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Demokrasi dalam Islam

Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (*pemerintahan*). Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan kata lain suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam melakukan kontrol sosial. Dewasa ini, sistem pemerintahan demokrasi telah

⁹ Moch. Tolchah, *Dinamika Pendidikan Islam Minoritas Pasca Orde Baru*, 2015.

¹⁰ Khatibah, "Penelitian Kepustakaan" 0, no. 01 (2011): 145.

diterima oleh hamper seluruh Negara di dunia. memiliki tiga unsur utama, yaitu: adanya kemauan politik sebuah Negara (*state*), adanya kemauan yang kuat dari politik masyarakat (*political society*), dan adanya *civil society* yang kuat dan mandiri. Ketiga unsur ini diproses dalam sebuah negara dengan tujuan untuk menjamin adanya kekuasaan mayoritas, suara rakyat dan pemilihan umum yang dilangsungkan dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia.¹¹

Setelah itu untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang demokratis dalam berbagai aspek kehidupan perlu diupayakan suatu proses demokratisasi. Demokratisasi adalah suatu proses berkelanjutan untuk menuju demokrasi. Dalam konteks pendidikan merupakan sarana dan kesempatan paling strategis untuk mewujudkan iklim demokratisasi. Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai suatu proses sosialisasi, internalisasi, dan aktualisasi konsep, dan nilai-nilai demokrasi melalui proses pembelajaran berlangsung.¹²

Secara etimologis, Islam tidak mengenal istilah demokrasi. Islam hanya mengenal istilah musyawarah sebagai pondasi utama dalam kehidupan sosial. Beranjak dari konsepsi musyawarah inilah Islam memperkenalkan gagasan demokrasi, yakni gagasan yang mengharuskan seluruh proses politik melandaskan diri pada partisipasi, kebebasan, dan persamaan.¹³ Umat Islam telah bersepakat, bahwa salah satu prinsip ajaran Islam tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah prinsip musyawarah. Musyawarah atau syura adalah sesuatu yang sangat penting guna menciptakan peraturan di dalam masyarakat mana pun. Dan setiap negara maju yang menginginkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi rakyatnya, tetap memegang prinsip musawarah.¹⁴

Jadi, setidaknya menurut Ubaedillah dan Rozak menyatakan bahwa, terdapat tiga pandangan tentang Islam dan Demokrasi, sebagaimana yang

¹¹ Toto Suharto, "Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat," *Cakrawala Pendidikan* 24, no. 3 (2005): 1–26.

¹² Ali Miftakhu Rosyad and Muhammad Anas Maarif, "Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 75–99, <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491>.

¹³ A. M. Musa, *Membumihngkan Islam Nusantara: Respon Islam Terhadap Isu-Isu Aktual* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014).

¹⁴ Y Ilyas, *Kuliah Akhlaq* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2012).

dikutip oleh Irawan dan Denny¹⁵ *Pertama*, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinatkan dengan demokrasi karena Islam merupakan sistem politik yang mandiri (*self-sufficient*). Dalam bahasa politik muslim, Islam sebagai agama yang sempurna tidak saja mengatur persoalan keimanan (*akidah*) dan ibadah, melainkan mengatur segala aspek kehidupan umat manusia termasuk aspek kehidupan bernegara. Pandangan ini didukung oleh kalangan pemikir muslim seperti Sayyid Qutb dan Thabathabi.

Hubungan Islam dan demokrasi bersifat saling menguntungkan secara eksklusif (*mutually exclusve*). Bagi penganut demokrasi sebagai satu-satunya sistem terbaik yang tersedia saat ini, Islam dipandang sebagai sistem politik alternatif terhadap demokrasi. Sebaliknya, bagi pandangan Islam sebagai sistem yang lengkap. Islam dan demokrasi adalah sistem yang berbeda, karena itu demokrasi sebagai konsep barat tidak tepat dijadikan sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam masyarakat muslim, Islam tidak bisa dipadukan dengan demokrasi.¹⁶

Kedua, kelompok kedua ini menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Tetapi, mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi. Bagi kelompok ini, Islam merupakan sistem politik demokratis kalau demokratis didefinisikan secara substantif, yakni kedaulatan di tangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat ini. Dengan demikian, dalam pandangan kelompok ini, demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Di antara tokoh dari kelompok ini adalah Al-Maududi dan Moh. Natsir.¹⁷

Ketiga, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikan negara-negara maju. Islam di dalam dirinya demokratis tidak hanya karena prinsip *Syura* (musyawarah), tetapi karena adanya konsep *ijtihad* dan *ijma* (konsensus). Di antara tokoh muslim yang mendukung pandangan ini yaitu Fahmi Huwaidi, M. Husain

¹⁵ Irawan and Hermawan, "Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam."

¹⁶ Ubaedillah & Rozak, *Pendidikan Kewarga Negara Civic Education Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*.

¹⁷ Ubaedillah & Rozak.

Haekal, dan Muhammad Abduh. Di Indonesia diwakili oleh Nurcholis Majid, Abdurrahman Wahid, Amin Rais, dan Ahmad Syafi'i Ma'arif.¹⁸

Senada dengan apa yang dinyatakan Ubaedillah dan Rozak di atas, Aat Hidayat menyampaikan, intelektual muslim terdabgi menjadi tiga kelompok dalam konteks demokrasi. Pertama, mayoritas masyarakat Islam tidak memisahkan antara demokrasi dengan Islam. Kelompok yang kedua, masyarakat Islam menegaskan bahwa ada hubungan yang canggung antara Islam dan demokrasi. Kemudian yang ketiga, sebagian masyarakat Islam lainnya menerima adanya hubungan Islam dengan demokrasi.¹⁹

Demokrasi dalam Pendidikan Islam

Demokrasi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling menunjang, karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian. Melalui pendidikan anak-anak ditempatkan sebagai manusia yang dimanusiakan. Pendidikan hanya memberikan layanan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang lama kepada setiap anak (peserta didik) mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Demokrasi pendidikan, adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil.²⁰

Sebagaimana amanat UUD 1945 mengatakan bahwa pemerintah akan mewujudkan suatu sistem pendidikan yang mencerdaskan rakyat. Pendidikan yang mencerdaskan rakyat adalah pendidikan yang membawa warga negaranya sebagai anggota masyarakat demokratis. Proses pendidikan yang demikian bukanlah proses indoktrinasi tetapi menyadarkan rakyat akan hak-haknya dan memberikan kemampuan pada rakyat untuk secara bersama-sama mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama.²¹

Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar 1945

¹⁸ Ubaedillah & Rozak.

¹⁹ Aat Hidayat, "Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Addin* 9, no. 2 (2015): 401–20.

²⁰ Irawan and Hermawan, "Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam."

²¹ H. A Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

pasal 31 (1) yang berbunyi bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yang mencakupi orang tua , masyarakat , dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama didalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik , serta juga dengan pengelola pendidikan.²²

Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Demokrasi dalam Pendidikan Islam menurut Ramayulus dapat dibagi menjadi dua, yaitu (1) kebebasan bagi pendidik dan peserta didik. Kebebasan disini meliputi: kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan potensi dan kebebasan berpendapat, (2) Persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam. Karena, Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar.²³

Peserta didik yang masuk di lembaga pendidikan tidak ada perbedaan derajat atau martabat, karena penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan. Pendidik harus mengajar anak orang yang tidak mampu dengan yang mampu secara bersama atas dasar penyediaan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik. Sehingga pendidik harus mampu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. Bagi peserta didik yang kurang aspiratif dalam belajar diberikan latihan-latihan remedial secara khusus, sedangkan yang cerdas diberikan tambahan (pengajaran) yang belum dipelajarinya.²⁴

Implementasi Nilai Demokrasi dalam Pendidikan Islam

Proses pembelajaran harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi yaitu dengan penghargaan terhadap kemampuan peserta didik, menerapkan persamaan kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik. proses pendidikan demokratis ditujukan kepada pengembangan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.

²² Daulay, “Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.”

²³ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, n.d.).

²⁴ Irawan and Hermawan, “Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam.”

Sebagaimana dapat dilihat dalam demokrasi itu sendiri bahwa demokrasi dalam praktiknya di mana pun di muka bumi selalu menuntut tiga atau empat syarat yang saling melengkapi: rasa tanggung jawab, lapang dada, rela menerima kekalahan secara sportif, dan tidak membiarkan kesadaran membeku.²⁵ Jadi pendidik hendaknya memposisikan peserta didiknya sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya tersebut.

Oleh sebab itu dalam proses pembelajaran, harus dihindari suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan, syarat dengan perintah dan instruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif dan tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan. Bahkan sebagai aplikasi dari prinsip demokrasi, pendidikan diselenggarakan secara gratis, tidak terikat pada batas waktu tertentu, ijazah, atau nilai angka-angka dalam ujian ataupun peraturan-peraturan khusus dalam pemerintahan siswa. Sebaliknya, bila seseorang berkeinginan kuat untuk belajar, cinta kepada ilmu ataupun melakukan penelitian, pinta untuk belajar terbuka luas baginya. Secara esensial, demokrasi pendidikan merupakan suatu gambaran ideal yang akan terus diperjuangkan dan disempurnakan.²⁶

Dalam rangka mendukung implementasi nilai demokrasi dalam pendidikan Islam, hendaknya menciptakan model dan desain baru sebagai alternatif Pendidikan yang ideal. Meminjam prinsip hakekat pendidikan Islam yang di gunakan *Hasim Amir*, yang mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang idealistik, yakni pendidikan yang *integralistik, humanistik, pragmatik* dan *berakar pada budaya kuat*.²⁷ Tawaran Hasim Amir ini, yang di kutip A. Malik Fadjar, dapat digunakan sebagai konsep demokratisasi pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan masyarakat Indonesia, yaitu:

Pertama, Pendidikan integralistik, merupakan model pendidikan yang diorientasikan pada komponen-komponen kehidupan yang meliputi: pendidikan yang berorientasi pada *rabbaniyah* (ketuhanan), *insaniyah* (kemanusiaan) dan *alamiyah* [alam pada umumnya], sebagai suatu yang integralistik bagi perwujudan kehidupan yang baik dan untuk mewujudkan

²⁵ A. S. Maarif, *Islam Dan Bingkai KeIndonesiaan Dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).

²⁶ Irawan and Hermawan, "Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam."

²⁷ Ahmad Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999).

rahmatan lil 'alamin, serta pendidikan yang menganggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan dan individual-sosial.

Pendidikan integralistik diharapkan dapat menghasilkan manusia (peserta didik) yang memiliki integralitas tinggi, yang dapat bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, menyatu dengan dirinya sendiri sehingga tidak memiliki kepribadian belah atau kepribadian mendua, menyatu dengan masyarakat sehingga dapat menghilangkan disintegrasi sosial, dan dapat menyatu dengan alam sehingga tidak membuat kerusakan, tetapi menjaga, memelihara dan memberdayakan serta mengoptimalkan potensi alam sesuai kebutuhan manusia.²⁸

Kedua, Pendidikan yang *humanistik*, merupakan model pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai manusia (*humanisasi*), yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan *fitrahnya*. Maka manusia sebagai makhluk hidup, ia harus mampu melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya. Maka posisi pendidikan dapat membangun proses humanisasi, artinya menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan di perlakukan dengan adil, hak untuk menyuarahkan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang, dan lain sebagainya.

Pendidikan humanistik, diharapkan dapat mengembalikan peran dan fungsi manusia yaitu mengembalikan manusia kepada *fitrahnya* sebagai sebaik-baik makhluk. Maka, manusia “yang manusiawi” yang dihasilkan oleh pendidikan yang humanistik diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk manusia berpikir, merasa dan berkemauan serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dapat mengganti sifat individualistik, egoistik, egosentrik dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat menghormati dan dihormati, sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan, sifat menghargai hak-hak asasi manusia, sifat menghargai perbedaan dan sebagainya.²⁹

Ketiga, Pendidikan *pragmatik* adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya baik bersifat jasmani maupun rohani, seperti berpikir, merasa, aktualisasi diri, keadilan, dan kebutuhan spiritual ilahiyah.

²⁸ Fadjar.

²⁹ Fadjar.

Dengan demikian, model pendidikan dengan pendekatan pragmatik diharapkan dapat mencetak manusia pragmatik yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, peka terhadap masalah-masalah sosial kemanusiaan dan dapat membedakan manusia dari kondisi dan situasi yang tidak manusiawi.³⁰

Keempat, Pendidikan yang berakar pada budaya, yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa, kelompok etnis, atau suatu masyarakat tertentu.

Maka dengan model pendidikan yang berakar pada budaya, diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada diri sendiri, dan membangun peradaban berdasarkan budaya sendiri yang akan menjadi warisan monumental dari nenek moyangnya dan bukan budaya bangsa lain. Dalam hal ini bukan berarti kita menjadi orang yang anti kemodernan, perubahan, reformasi dan menolak begitu saja arus transformasi budaya dari luar tanpa melakukan seleksi dan alasan yang kuat.³¹

Dasar Demokrasi Pendidikan Menurut Islam

Demokratisasi pendidikan secara umum merupakan keadaan di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam menikmati hak Pendidikan.³² Ketika definisi umum ini dipersempit maka akan muncul konsep bahwa implementasi demokratisasi pendidikan tersebut terlihat dari kegiatan pembelajaran dengan suasana saling menghormati, bebas mengutarakan pendapat dengan tetap menghargai serta adanya keterlaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang antara pendidik dan peserta didik.³³

Salah satu ayat dalam Alquran yang sangat dekat dengan konsep demokratisasi pendidikan adalah Surah Āl ‘Imrān: 159. Di dalam ayat ini

³⁰ Fadjar.

³¹ Fadjar.

³² E Setyawan and Y P D Sasongko, “Regulasi Komunikasi Interpersonal Dalam Demokratisasi Pendidikan Indonesia (Studi Deskriptif Restorasi Dunia Pendidikan Di Indonesia Dalam Perspektif Henry ...,” *Jurnal Komunikasi* 12, no. 30 (2021).

³³ Neneng Rumsiti, “Demokratisasi Pendidikan Islam Dalam Kearifan Lokal Dayak Hapakat Basara Dan Korelasinya Dengan Al-Qur ’ an Pendahuluan Memperoleh Pendidikan Adalah Hak Setiap Orang . Bahkan Negara Memberi Ruang Khusus Terkait Hak Tersebut . Hal Ini Menunjukkan Bahwa Ada” 8, no. 1 (2022): 1–18.

terkandung beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan demokratisasi Pendidikan.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل
عمران: 159).

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

Ada dua riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya surah Āl ‘Imrān: 159 ini. Riwayat pertama menyatakan bahwa ayat ini diturunkan ketika kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam perang Badar dan saat itu banyak orang musyrik yang menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Menurut Abu Bakar, tawanan tersebut hendaknya diserahkan kepada keluarga mereka dengan membayar tebusan.

Adapun menurut Umar, para tawanan tersebut hendaknya dibunuh. Dalam proses musyawarah ini, terdapat dua pendapat yang sangat bertolak belakang, sehingga turunlah surah Āl ‘Imrān: 159 yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW. harus bersifat lemah lembut agar menjadi daya tarik bagi umat di luar Islam. Sehingga ayat ini turun sebagai dukungan pada pendapat Abu Bakar al-Ṣiddīq. Di sisi lain, ayat ini juga menjadi pelajaran bagi Umar bin Khattab bahwa jika sebuah pendapat tidak diterima, maka hendaklah bertawakal kepada Allah SWT.³⁴

Adapun menurut riwayat kedua, ayat ini turun karena didasarkan pada peristiwa penyusunan strategi ketika perang Uhud. Menurut Rasulullah Saw.,

³⁴ Ahmad Agis Mubarak, “Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran,” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 147–60, <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.

kaum muslimin hendaknya tetap bertahan di Madinah sembari menunggu kedatangan pasukan musuh. Namun pendapat tersebut ditolak oleh beberapa sahabat, terutama sahabat yang masih muda. Mereka menginginkan agar pasukan muslimin keluar dari Madinah dan menyerang musuh. Hingga turunlah surah Āl ‘Imrān: 159 ini dan akhirnya pendapat sahabat inilah yang kemudian disetujui oleh Rasulullah SAW. Keputusan ini memang berakhir dengan kesedihan, umat Islam kalah dalam peperangan tersebut. Inilah prinsip penting dari sebuah musyawarah, masalah hasil tentu harus diserahkan kepada Allah SWT.³⁵

Menurut Tafsīr al-Munīr, surah Āl ‘Imrān: 159 ini merupakan bentuk karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum mukmin. Karunia tersebut ialah dengan menjadikan hati Nabi Muhammad SAW lembut terhadap umat, memiliki sifat pemaaf dan selalu mengajak bermusyawarah. Sikap-sikap seperti inilah yang membuat umat Nabi Muhammad SAW dengan sukarela masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Abdullah bin ‘Amr pernah berkata: “Sesungguhnya saya telah mengetahui sifat-sifat Rasulullah SAW di dalam kitab suci terdahulu. Beliau bukanlah orang yang keras, berhati kasar, suka gaduh dan berkata keras di pasar dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan akan tetapi memaafkannya”.

Selain sifat lembut dan pemaaf, di dalam Tafsīr al-Munīr juga dijelaskan mengenai perilaku musyawarah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kegiatan musyawarah ini pun tidak hanya dilakukan dalam perkara agama saja. Semua urusan, termasuk perkara politik dan kepentingan duniawi lainnya dibicarakan secara baik dan bersama dengan para sahabat. Tentu musyawarah yang dilakukan merupakan kegiatan musyawarah yang penuh dengan etika Islami, seperti beradab dan menghormati pendapat orang yang ahli dalam bidangnya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya tentang al-‘azm (keputusan atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu), lalu beliau bersabda: “Bermusyawarahlah dan mintalah pandangan kepada orang-orang yang ahli (pakar), kemudian ikutilah pandangan yang mereka berikan.” Mengenai hasil dari pandangan yang diikuti tersebut, maka harus diserahkan kepada Allah SWT dengan jalan bertawakal.³⁶

³⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007).

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2013).

Mengenai musyawarah ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa asal kata musyawarah ialah “shāwara” yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Dari sini makna musyawarah tersebut berkembang sehingga didapat makna bahwa segala bentuk musyawarah pasti akan melahirkan sesuatu yang baik dan manis seperti madu. Untuk melahirkan sesuatu yang manis ini diperlukanlah beberapa sikap terpuji, seperti lemah lembut, tidak kasar dan tidak keras hati. Sebab beberapa perilaku tersebut akan memberi kelancaran dan keberhasilan dalam proses musyawarah.³⁷

Adapun menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ia menyatakan bahwa ayat ini berbicara tentang ilmu memimpin. Sebab, dalam ayat ini dijelaskan beberapa syarat pemimpin, seperti bersikap lemah lembut dan bermusyawarah. Menurut Buya Hamka, sikap lemah lembut tersebut bukan berarti tidak tegas.

Banyak kasus yang menggambarkan ketegasan Nabi Muhammad saw. misalnya saja terhadap kelompok yang tidak menyepakati hasil perjanjian Hudaibiyah, tegas dalam mendiktekan apa yang harus dicatat oleh Ali bin Abi Talib dan tegas dalam beberapa perkara ibadah haji. Dalam hal musyawarah, Buya Hamka menyebut bahwa musyawarah merupakan inti dari ayat ini. Kegiatan musyawarah adalah dasar dari politik dan pemerintahan Islam. Sebab, dalam kegiatan musyawarah akan mampu merangkul banyak kelompok sehingga kegiatan pemerintahan yang selalu identik dengan perbedaan akan mampu berjalan dengan semestinya.³⁸

PENUTUP

Konsep demokrasi dalam Islam adalah bahwa dalam Islam tidak mengenal istilah demokrasi. Karena demokrasi ini berasal dari Barat atau Eropa yang masuk melalui peradaban Islam. Islam hanya mengenal istilah musyawarah sebagai fondasi utama dalam kehidupan sosial. Beranjak dari konsepsi musyawarah inilah Islam memperkenalkan gagasan demokrasi, yakni gagasan yang mengharuskan seluruh proses politik melandaskan diri pada partisipasi, kebebasan, dan persamaan. Di dalam Al-Qur'an pun banyak ayat yang menjelaskan tentang musyawarah salah satunya dalam Surah Āl 'Imrān: 159. Sehingga kita dapat membedakan bahwa Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik berbeda. Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti

³⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*.

³⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015).

dipahami dan dipraktikan di negara-negara barat. adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikan di negara-negara maju.

Pendidikan demokratis dalam perspektif Islam adalah dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam yaitu: Adanya kebebasan bagi pendidik dan peserta didik, yang mana kebebasan di sini meliputi: kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan potensi dan kebebasan berpendapat. Persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam. Karena, Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar.

Penghormatan akan martabat individu dalam pendidikan Islam. Demokrasi sebagai penghormatan akan martabat orang lain, maksudnya ialah seseorang akan memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya sendiri. sehingga dapat tercipta manusia atau pun masyarakat yang bertanggung jawab, bermartabat dan berakhlak mulia. Dalam rangka mendukung implementasi nilai demokrasi dalam pendidikan Islam, hendaknya menciptakan model dan desain baru sebagai alternatif Pendidikan yang ideal. Meminjam prinsip hakekat pendidikan Islam yang di gunakan Hasim Amir, yang mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang idealistik, yakni pendidikan yang *integralistik, humanistik, pragmatik dan berakar pada budaya kuat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, Muhammad Roihan. "Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2017): 91. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.632>.
- Fadjar, Ahmad Malik. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Fajar Dunia, 1999.
- Fatmariza. "MEWUJUDKAN MASYARAKAT DEMOKRATIS MELALUI PEMELITIAN PENDIDIKAN YANG SERPERSPEKTIF GENDER," 2015.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hidayat, Aat. "Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Addin* 9, no. 2 (2015): 401–20.
- Ilyas, Y. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2012.

- Irawan, Irawan, and Denny Hermawan. "Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019): 626–31. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i2.5254>.
- Khatibah. "Penelitian Kepustakaan" 0, no. 01 (2011): 145.
- Maarif, A. S. *Islam Dan Bingkai KeIndonesiaan Dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Madekhan, Madekhan. "Tantangan Pembaruan Pendidikan Di Indonesia." *Kuttab* 5, no. 2 (2021): 130. <https://doi.org/10.30736/ktb.v5i2.702>.
- Mubarak, Ahmad Agis. "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 147–60. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.
- Muhammad Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Musa, A. M. *Membumihngkan Islam Nusantara: Respon Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Olofsson, A. D., G. Fransson, and J. O. Lindberg. "A Study of the Use of Digital Technology and Its Conditions with a View to Understanding What 'Adequate Digital Competence' May Mean in a National Policy Initiative." *Educational Studies* 46, no. 6 (2020): 727–43. <https://doi.org/10.1080/03055698.2019.1651694>.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, n.d.
- Rosyad, Ali Miftakhu, and Muhammad Anas Maarif. "Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 75–99. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491>.
- Rumsiti, Neneng. "Demokratisasi Pendidikan Islam Dalam Kearifan Lokal Dayak Hapakat Basara Dan Korelasinya Dengan Al-Qur ' an Pendahuluan Memperoleh Pendidikan Adalah Hak Setiap Orang . Bahkan Negara Memberi Ruang Khusus Terkait Hak Tersebut . Hal Ini Menunjukkan Bahwa Ada" 8, no. 1 (2022): 1–18.
- Saleh, Khairul, Muhsim, and Nurul Hidayati Murtafiah. "Implementasi Pendidikan Multikultural Di Indonesia Antara Harapan Dan Realita." *Journal of Islamic Education and Learning* 2, no. 2 (2022): 111–26. <https://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JIEL/article/view/60>.
- Setyawan, E, and Y P D Sasongko. "Regulasi Komunikasi Interpersonal Dalam Demokratisasi Pendidikan Indonesia (Studi Deskriptif Restorasi Dunia Pendidikan Di Indonesia Dalam Perspektif Henry" *Jurnal Komunikasi* 12, no. 30 (2021).

- Suharto, Toto. "Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat." *Cakrawala Pendidikan* 24, no. 3 (2005): 1–26.
- Tilaar, H. A. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Tirtarahardja, U., Sulo L. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Tolchah, Moch. *Dinamika Pendidikan Islam Minoritas Pasca Orde Baru*, 2015.
- Ubaedillah & Rozak. *Pendidikan Kewarga Negara Civic Education Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2013.